

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan di berbagai aspek kehidupan juga ikut berkembang. Hal ini merupakan petanda baik bagi Indonesia, jika dalam perkembangan di berbagai aspek kehidupan tersebut diiringi dengan tingkat hukum yang ketat, aman dan meningkat, serta terwujud adanya kepastian hukum. Sebagai contohnya, ketika menjalin kerja sama hendaknya diawali dengan membuat suatu pernyataan atau perjanjian yang sah antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dengan demikian, perjanjian tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak dalam perjanjian tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam Pasal 1313, yang menyatakan bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”¹

Perjanjian ini dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan antara para pihak yang dengan cara negosiasi dirumuskan ke dalam klausul-klausul yang terdapat dalam suatu perjanjian tersebut. Selain itu dalam pembuatan perjanjian juga harus memperhatikan beberapa asas, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik dan asas kepribadian.

Diantara kelima asas tersebut yang paling mempunyai peran penting untuk

¹ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke Tigapuluh Sembilan, Penerbit PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2008 ; hlm.338.

membuat suatu perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda*.

Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yang berbunyi bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”² Dalam Pasal 1338 ayat 1 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa saja, menentukan isi perjanjian, pelaksanaannya dan persyaratannya, serta menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.³ Tidak hanya itu, asas kepastian hukum atau biasanya disebut dengan asas *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, layaknya sebuah undang-undang.⁴ Dalam asas ini dapat disimpulkan bahwa asas *pacta sunt servanda* hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya tanpa adanya intervensi dari pihak ketiga ataupun pihak lainnya. Meskipun dalam pembuatan perjanjian para pihak dapat menentukan isi perjanjiannya sesuai dengan kesepakatan para pihak dan isi dari perjanjian tersebut tidak dapat diintervensi oleh pihak ketiga maupun pihak lainnya, namun dalam praktiknya para pihak dalam membuat klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian tidak boleh

² Ibid.hlm.342.

³ <http://hukumindonesia-laylay.blogspot.co.id/2012/02/asas-asas-perjanjian.html>, Stanley Lesmana, Penjelasan Asas Perjanjian, tanggal akses 15 September 2015.

⁴ Ibid.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Selain itu, dalam membuat perjanjian para pihak juga harus melakukannya dengan itikad baik. Artinya, para pihak harus melakukan perbuatan tersebut tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, dengan tidak melihat kepentingan diri sendiri saja, melainkan juga melihat kepentingan orang lain. Apabila ada pihak yang membuat perjanjian dengan itikad buruk, dengan maksud menipu pihak lain untuk memperoleh keuntungan darinya, maka perjanjian tersebut cacat subjektif yang dapat menyebabkan perjanjian itu dapat dibatalkan.

Merujuk pada asas dalam perjanjian dan telah diaturnya perjanjian dalam buku ke-III KUH Perdata yang memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian merupakan salah satu cara yang paling sering digunakan oleh subjek hukum untuk melakukan kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satunya perjanjian ini digunakan di berbagai kegiatan pendidikan.

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu bangsa, khususnya di Indonesia, karena dengan pendidikan, watak, moral, kepribadian dan dalam segala aspek kehidupan seseorang itu terbentuk menjadi lebih baik. Selain itu juga dapat mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28C ayat 1, yang menyatakan :

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.⁵

Tidak hanya itu, pendidikan juga mempunyai tujuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu :

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”⁶

Untuk mewujudkan peran pendidikan tersebut, tidak cukup peran dari pemerintah saja melainkan juga diperlukan peran dari lembaga pendidikan itu sendiri. Oleh sebab itu, untuk melaksanakan peran suatu lembaga pendidikan dalam mewujudkan amanat Pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tujuan pendidikan nasional tersebut, maka diperlukan kerja sama antara lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan lainnya atau lembaga diluar pendidikan. Misalnya, untuk meningkatkan dan menciptakan kualitas mahasiswa-mahasiswi yang berjiwa unggul dan berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional, maka pendidikan Perguruan Tinggi di Indonesia melakukan kerja sama dengan berbagai Perguruan Tinggi di dalam maupun Perguruan Tinggi di luar Indonesia yang terakreditasi atau yang diakui

⁵ Pasal 28C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, di akses dari <http://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/uud1945.pdf>, tanggal akses 15 September 2015.

⁶ Pasal 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diakses dari http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_20_03.htm, tanggal akses 15 September 2015.

di negaranya. Contoh Perguruan Tinggi Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan perjanjian kerja sama Tripartit tentang Program Pembelajaran Antar Perguruan Tinggi, serta Perguruan Tinggi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) melakukan perjanjian kerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) tentang Program Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr). Kerja sama yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi tersebut merupakan suatu proses untuk mempermudah tercapainya tujuan masing-masing pihak.

Perjanjian yang dibuat oleh Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta baik jumlah atau macamnya semakin bertambah banyak dan beraneka ragam. Hal tersebut sejalan dengan dinamika yang dialami oleh masing-masing Perguruan Tinggi dan berkaitan dengan meningkatnya aktivitas perjanjian di kalangan kehidupan masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang tidak menepati janji atau wanprestasi. Hal ini, menyebabkan para pihak kesulitan untuk melaksanakan aktivitas Perguruan Tinggi dan merusak hubungan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu, perlu adanya suatu tindakan nyata untuk meminimalkan wanprestasi yang terjadi dalam aktivitas perjanjian tersebut. Dengan berkembangnya perjanjian ini, para pihak biasanya melakukan pendekatan atau pemahaman terlebih dahulu sebelum menyetujui perjanjiannya. Setelah terciptanya pemahaman antara satu pihak dengan pihak lainnya, maka disusunlah suatu proses pra perjanjian yang biasanya

disebut dengan nota kesepahaman atau sering disebut dengan istilah *Memorandum Of Understanding*.

Menurut Erman Rajagukguk, *memorandum of understanding* adalah dokumen yang memuat saling pengertian diantara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari *memorandum of understanding* harus dimasukkan ke dalam perjanjian, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat.⁷ Berdasarkan definisi tersebut, dapat dilihat bahwa *memorandum of understanding* tidak mengatur hubungan hukum antara para pihak. Dalam KUH Perdata maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya tidak ditemukan ketentuan khusus yang mengatur tentang *memorandum of understanding*, sehingga tidak memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang membuat *memorandum of understanding* tersebut. Hal demikian dapat mengakibatkan jika salah satu pihak wanprestasi, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menggugat pihak yang wanprestasi itu.

Memorandum of understanding ada dan muncul akibat adanya asas kebebasan berkontrak. Oleh sebab itu, substansi dari *memorandum of understanding* merupakan kesepakatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, sehingga dalam *memorandum of understanding* mempunyai ikatan moral antara para pihak yang apabila salah satu pihak wanprestasi, maka pihak

⁷ Erman Rajagukguk dalam Salim H.S., H. Abdullah, dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, cetakan kelima, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011; hlm.46.

tersebut dapat dikenakan sanksi moral yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan kepada pihak yang berwanprestasi tersebut.

Memorandum of understanding itu sendiri dibuat dengan tujuan :⁸

1. Untuk menghindari kesulitan pembatalan suatu agreement nantinya, dalam arti belum bisa dipastikan apakah kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti, sehingga dibuatlah *memorandum of understanding* yang mudah dibatalkan.
2. Penandatanganan perjanjian masih lama karena masih dilakukan negosiasi yang alot. Karena itu, daripada tidak ada ikatan apa-apa sebelum ditandatangani perjanjian tersebut, dibuatlah *memorandum of understanding* yang akan berlaku sementara waktu.
3. Adanya keraguan para pihak dan masih perlu waktu untuk pikir-pikir dalam hal penandatanganan suatu perjanjian, sehingga untuk sementara waktu dibuatlah suatu *memorandum of understanding*.

Berdasarkan tujuan *memorandum of understanding* tersebut, dapat dilihat walaupun *memorandum of understanding* itu mudah dibatalkan dan belum mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, namun dalam prakteknya *memorandum of understanding* tetap sering digunakan dalam membuat perjanjian di berbagai bidang kehidupan yang salah satunya adalah kegiatan pendidikan. Dikarenakan *memorandum of understanding* menunjukkan niat

⁸ Munir Fuady, dalam Salim H.S., H.Abdullah, dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding(MoU)*, cetakan kelima,Penerbit Sinar Grafika,Jakarta,2011; hlm.52.

bahwa para pihak akan melanjutkan klausul-klausul yang telah disepakati bersama dalam *memorandum of understanding* ke dalam suatu perjanjian.

Universitas Atma Jaya Yogyakarta merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang menggunakan *memorandum of understanding* dalam menjalin hubungan kerja sama, namun permasalahannya adalah apakah *memorandum of understanding* yang telah dibuat oleh pihak Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan *partner* telah mencapai tujuan yang diharapkan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, menimbang pentingnya peran *memorandum of understanding* dalam membuat suatu perjanjian, maka dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang : “EFEKTIVITAS *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* (MoU) DALAM PEMBUATAN SUATU PERJANJIAN DI BIDANG PENDIDIKAN, STUDI KASUS DI UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut, bagaimanakah efektivitas *memorandum of understanding* dalam pembuatan suatu perjanjian di bidang pendidikan, studi kasus di Universitas Atma Jaya Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai efektivitas *memorandum of understanding* (MoU) dalam

pembuatan suatu perjanjian di bidang pendidikan, studi kasus di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Melalui penulisan ini, diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai hukum perjanjian dan *memorandum of understanding* (MoU).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Melalui penulisan ini, diharapkan mampu memberikan suatu masukan atau sumbangan pemikiran kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta tentang efektivitas *memorandum of understanding* dalam pembuatan suatu perjanjian, khususnya di bidang pendidikan.

b. Bagi Pemerintah

Melalui penulisan ini, diharapkan pemerintah dapat membuat suatu kebijakan hukum mengenai *memorandum of understanding* agar para pihak dalam *memorandum of understanding* mempunyai kepastian hukum.

c. Bagi Masyarakat dan Akademika

Melalui penulisan ini, diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan pendidikan mengenai efektivitas *memorandum of understanding* dalam pembuatan suatu perjanjian.

d. Bagi Penulis

Melalui penulisan ini, diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai efektivitas *memorandum of understanding* dalam pembuatan suatu perjanjian, khususnya di bidang pendidikan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan di Internet, penulisan hukum dengan topik “Efektivitas *Memorandum of Understanding* (MoU) Dalam Pembuatan Suatu Perjanjian di Bidang Pendidikan, Studi Kasus di Universitas Atma Jaya Yogyakarta)” belum pernah dikaji atau diteliti oleh penulis lain, sehingga penulisan hukum ini bukan merupakan plagiasi dari karya lain. Namun berkenaan dengan tema penulisan, yaitu efektivitas *memorandum of understanding* (MoU) dalam pembuatan suatu perjanjian di bidang pendidikan, sebelumnya pernah dijadikan beberapa tema penulisan yakni :

1. Penulisan dengan judul “Kekuatan Hukum *Memorandum of Understanding* (MoU) Dalam Penerapannya Berdasarkan KUH Perdata” di tulis oleh Adawiah Benny La Tanrang dengan NPM B 111 06 880, Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin. Pokok permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana kedudukan hukum dan kekuatan mengikatnya *memorandum of understanding* dalam penerapannya berdasarkan KUH Perdata dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi pengingkaran oleh salah satu pihak dalam *memorandum of understanding*?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam penerapannya berdasarkan KUH Perdata dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi pengingkaran oleh salah satu pihak dalam *Memorandum of Understanding* (MoU).

Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan hukum *memorandum of understanding* dilihat dari adanya asas kebebasan berkontrak dan terpenuhinya unsur Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian tersebut dan kekuatan hukum mengikatnya pun *memorandum of understanding* memiliki 2 (dua) kriteria, yakni kekuatan mengikat layaknya suatu perjanjian apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata), serta telah memenuhi faktor-faktor yang menentukan daya mengikatnya suatu perjanjian (Pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata) dan sebaliknya, *memorandum of understanding* yang tidak memenuhi Pasal 1320, 1335 dan 1337 KUH Perdata, maka *memorandum of understanding* tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat layaknya suatu perjanjian.

Perbedaan tulisan ini dengan penulisan hukum penulis adalah tulisan ini meneliti tentang kekuatan hukum memorandum of understanding (MoU) dalam penerapannya berdasarkan KUH Perdata, sedangkan penulisan hukum penulis membahas tentang efektivitas memorandum of understanding (MoU) dalam pembuatan suatu perjanjian di bidang pendidikan (studi kasus di Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

2. Penulisan dengan judul “Kedudukan dan Kekuatan Hukum *Memorandum of Understanding* Ditinjau Dari Segi Hukum Perjanjian” ditulis oleh Rudi Hartono Manalu dengan NPM 2007-41-156, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Adapun pokok permasalahannya, yaitu bagaimana kedudukan hukum dari *memorandum of understanding* ditinjau dari hukum perjanjian dan bagaimana akibatnya jika ada salah satu pihak melakukan pengingkaran terhadap klausul *memorandum of understanding*?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum dari *memorandum of understanding* bila ditinjau dari hukum perjanjian dan untuk mengetahui akibatnya jika salah satu pihak melakukan pengingkaran terhadap klausul-klausul *memorandum of understanding* tersebut.

Hasil dari penelitian tentang bagaimana kedudukan hukum dari *memorandum of understanding* ditinjau dari hukum perjanjian. Kedudukan memorandum of understanding ada dua macam yaitu, tidak bersifat perjanjian adalah dalam hal ini *memorandum of understanding* yang

mempunyai sanksi moral bukanlah suatu perjanjian. Menurut asas dalam perjanjian bahwa yang disebut perjanjian, apabila sifatnya sudah final dan bersifat sebagai perjanjian untuk *memorandum of understanding* yang sifatnya merupakan suatu perjanjian atau setingkat dengan perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, maka apabila terjadi suatu wanprestasi terhadap substansi dalam *memorandum of understanding* ini maka pihak tersebut harus memenuhi prestasi yang telah diingkarinya atau ia akan dikenai sanksi dari perundang-undangan yang berlaku.

Perbedaan tulisan ini dengan penulisan hukum penulis adalah tulisan ini meneliti tentang kedudukan dan kekuatan hukum memorandum of understanding ditinjau dari segi hukum perjanjian, sedangkan penulisan hukum penulis membahas tentang efektivitas memorandum of understanding (MoU) dalam pembuatan suatu perjanjian di bidang pendidikan (studi kasus di Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

3. Penulisan dengan judul “Kedudukan dan Kekuatan Hukum *Memorandum of Understanding* Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata” ditulis oleh Nurpinta dengan NPM 050200264, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Adapun pokok permasalahannya, yang pertama, bagaimanakah pengaturan mengenai hukum perjanjian yang berlaku saat ini ? Kedua, bagaimanakah penerapan *memorandum of understanding* dalam praktik kerjasama bisnis ? Ketiga, bagaimanakah kedudukan dan kekuatan

jika ada salah satu pihak atau debitur melakukan pengingkaran terhadap klausul-klausul dalam *memorandum of understanding* ?

Tujuan dari penelitian ada 2 (dua), yaitu :

a. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui kedudukan dan kekuatan hukum *memorandum of understanding*, maka akan diadakan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pengaturan dan doktrin-doktrin mengenai hukum perjanjian. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui kedudukan hukum dari *memorandum of understanding* ditinjau dari hukum perjanjian. Tujuan ketiga adalah untuk mengetahui akibat apa yang terjadi jika ada salah satu pihak melakukan pengingkaran terhadap klausul dalam *memorandum of understanding*.

b. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh bahan-bahan atau data-data guna penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah *memorandum of understanding* dibuat dan ditandatangani pihak eksekutif dari suatu perusahaan, sehingga untuk suatu perjanjian yang lebih rinci mesti dirancang dan dinegosiasi khusus oleh staf-staf yang lebih rendah tetapi menguasai secara teknis. Kedua, kedudukan *memorandum of understanding* ada dua macam , yaitu tidak bersifat perjanjian, sanksi

dalam *memorandum of understanding* merupakan sanksi moral yang tidak terdapat dalam suatu perjanjian dan bersifat sebagai perjanjian, yaitu menurut Teori Promisory Estoppel adalah dimana jika ada penawaran dan penerimaan dalam suatu kesepakatan, maka sejak saat itu ada suatu perjanjian yang mengikat. Ketiga, untuk *memorandum of understanding* yang sifatnya bukan merupakan suatu perjanjian, maka tidak ada sanksi apapun bagi yang mengingkarinya kecuali sanksi moral. Sedangkan untuk *memorandum of understanding* yang sifatnya merupakan suatu perjanjian, maka apabila terjadi suatu wanprestasi terhadap substansi dalam *memorandum of understanding* ini, maka pihak tersebut harus memenuhi prestasi yang telah diingkarinya atau ia akan dikenai sanksi dari perundang-undangan yang berlaku.

Perbedaan tulisan ini dengan penulisan hukum penulis adalah tulisan ini meneliti tentang kedudukan dan kekuatan hukum *memorandum of understanding* ditinjau dari segi hukum perikatan dalam KUH Perdata, sedangkan penulisan hukum penulis membahas tentang efektivitas *memorandum of understanding* (MoU) dalam pembuatan suatu perjanjian di bidang pendidikan (studi kasus di Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul pengertian yang dipaparkan, batasan konsep adalah :

1. Efektivitas adalah berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.
2. *Memorandum of understanding* adalah sebagai nota kesepahaman yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik dalam suatu negara maupun antarnegara untuk melakukan kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan dan jangka waktu tertentu.
3. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spriritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*). Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder (bahan hukum) yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Data

Data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah data primer dan data sekunder yang meliputi :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yakni subjek yang memberikan langsung jawaban atas pertanyaan yang diberikan berdasarkan kuesioner atau wawancara yang berkaitan langsung dengan masalah hukum yang diteliti. Responden ditentukan secara spesifik dengan menggunakan metode *special sampling*. Dalam penulisan ini, responden yang dimaksud adalah :

- 1) Wakil Rektor III Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- 2) Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- 3) Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- 4) Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- 5) Kantor Kerjasama dan Promosi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil peneelahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain :

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
 - c) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - d) Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - e) KUH Perdata, Buku ke-III tentang Perikatan.
 - f) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

primer, misalnya asas-asas hukum, buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, serta makalah tentang permasalahan hukum yang diteliti.

3. Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

1) Kuesioner

Cara pengumpulan data dengan cara kuesioner yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden berdasarkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya tentang efektivitas *memorandum of understanding* dalam pembuatan suatu perjanjian di bidang pendidikan. Kuesioner ini diberikan kepada Kantor Kerjasama dan Promosi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Kuesioner ini dilakukan melalui Via Email dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.

2) Wawancara

Data juga diperoleh dengan melakukan wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Wawancara dilakukan dengan seorang Wakil Rektor III Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Wakil Dekan III Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Kantor Kerja sama dan Promosi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Pertanyaan secara terstruktur tentang masalah hukum yang diteliti.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, pendapat para ahli, literatur, serta website mengenai masalah hukum yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di empat tempat yang ruang lingkupnya tetap diwilayah Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pertama, di Kampus I Gedung Alfonsus Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang beralamat di jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta. Kedua, di Kampus II Gedung Thomas Aquinas Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang beralamat di jalan Babarsari 44 Yogyakarta. Ketiga, di Kampus III Gedung Bonaventura Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang beralamat di jalan Babarsari 43 Yogyakarta. Keempat, di Kampus IV Gedung Theresa jalan Babarsari 6 Yogyakarta.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan objek dengan karakteristik atau ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh *memorandum of understanding* di bidang pendidikan yang dibuat oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan pihak lainnya. Mengingat populasi yang luas serta keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian untuk seluruhnya, maka penulis akan menggunakan sampel dalam mewakili seluruh populasi yang ada.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah berapapun jumlah yang diperoleh atas *memorandum of understanding* di bidang pendidikan yang dibuat oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan pihak lain dari tahun 2010 sampai dengan 2015 dipilih secara terstruktur dan sistematis.

6. Responden

Responden adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam bentuk wawancara maupun kuesioner yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Responden yang dimaksud adalah Wakil Rektor III Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Wakil Dekan III Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Kantor Kerja Sama dan Promosi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

7. Analisis

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian, dianalisis secara kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan suatu metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial. Metode kuantitatif ini diperoleh dari hasil wawancara maupun kuesioner dengan responden dan lampiran *memorandum of understanding* di bidang pendidikan dan hasil dari studi kepustakaan.

Setelah data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berfikir induktif. Proses berfikir induktif berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan baru yang berupa asas umum, dalam hal ini efektivitas *memorandum of understanding* dalam pembuatan suatu perjanjian di bidang pendidikan, studi kasus di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi terdiri atas tiga bab, yaitu :

1. Bab I adalah pendahuluan. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi.
2. Bab II adalah pembahasan. Bab ini terdiri atas tinjauan pustaka dan hasil penelitian mengenai efektivitas *memorandum of understanding* dalam pembuatan suatu perjanjian di bidang pendidikan, studi kasus di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Bab III adalah penutup. Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran.

Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah dan saran yang berkaitan dengan hasil temuan yang harus ditindak lanjuti.

